

DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Mukhammad Syarifudin Hidayatullah Handoko, Wahyu Hidayat Riyanto, Yunan Syaifullah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

* Corresponding author: handokoariv@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 17 September 2020

Revised 29 September 2020

Accepted 22 October

Available online 17 November 2020

Kata Kunci: *Economic Development Inequality; Investment; Regional Expenditure*

JEL Classification
D63; E22; H53; O11

Abstrak

The purpose of this research is to know the influence of investment and regional expenditure on economic development disparity between Regencies and Cities in East Borneo Province during the period 2013-2018. The number of samples used 9 regencies/cities. The method used is a quantitative approach using panel data regression analysis technique. Data is processed through E-Views. Based on the research, it was found that the value of inequality that occurred in the districts and cities of East Kalimantan in 2013-2018 was classified as low, where the highest inequality value was 0.33 which occurred in the city of Samarinda which is the capital of the province of East Kalimantan, this value is low. The result showed that simultaneously investment and regional expenditure variabel had a positive and significant effect on the level of economic development inequality, as well as partially investment and regional expenditure variables had a positive and significant effect on the level of economic development inequality between regency and city of East Borneo Province during period 2013-2018.

PENDAHULUAN

Tantangan dari pemerataan pembangunan adalah mengatasi masalah disparitas ekonomi antar daerah. Beberapa daerah memiliki pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari daerah lain. Secara teoritis disparitas ekonomi antar daerah dikembangkan oleh Douglas C. North (1964) dalam Sjafrizal (2012) yang membahas adanya prediksi tentang hubungan antara pembangunan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan ekonomi antar daerah, teori tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Hipotesa tersebut dibuktikan oleh Jeffrey G. Williamson (1965), melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antara wilayah negara maju dan negara berkembang. Studi empirik tersebut dikenal dengan Williamson Index yang membahas mengenai ukuran-ukuran ketimpangan antar daerah yang umumnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam maupun perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada suatu wilayah. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan berbedanya kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses perekonomiannya. Maka dari itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah yang terbelakang (Undeveloped Region). Masalah kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan kondisi ekonomi yang lumrah terjadi pada masing-masing daerah, dalam aspek ekonomi ketimpangan ini dapat dilihat melalui kemampuan tiap-tiap daerah dalam berproduktivitas menghasilkan barang maupun jasa yang digambarkan sebagai produk domestik regional bruto

(PDRB), oleh sebab itu PDRB merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran nilai ketimpangan ekonomi antar daerah, selain PDRB jumlah penduduk juga termasuk indikator lainnya yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan antar daerah, penggabungan ke-dua indikator tersebut akan menghasilkan rata-rata PDRB per kapita dan proyeksi penduduk.

Andhiani et al. (2018), mendapati bahwa secara simultan variabel investasi, belanja daerah, tingkat aglomerasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal serupa terjadi juga, pada secara simultan variabel investasi, belanja daerah, tingkat aglomerasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan, namun secara parsial hanya variabel investasi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan pada wilayah Sumatera periode 2011-2015, sedangkan Rosmeli (2014), menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2001 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Rata-rata nilai indeks wiliamson sebesar 0.3964, hasil dari penelitian menyebutkan bahwa variable belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ketimpangan, sedangkan variable belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai ketimpangan antar daerah. Secara tradisional pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah untuk meghasilkan PDRB, PDRB yang tinggi dapat menggambarkan tingkat pembangunan dan produktivitas yang tinggi. Namun meskipun PDRB pada suatu wilayah tersebut tinggi, tingkat pemerataan pembangunan antar daerah belum tentu dapat dikatakan merata. Pada proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan antar daerah menjadi tujuan utama, namun pada nyatanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan ketimpangan pembangunan antar daerah (Andhiani et al, 2018).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah PDRB tertinggi di Indonesia, daerah Pulau Jawa menduduki peringkat 4 besar penghasil PDRB dengan urutan pertama dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PDRB sebesar 1.736.196 milyar rupiah, disusul Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan dengan nilai total PDRB sebesar 1.563.756, 1.419.689, dan 941.283 milyar rupiah kemudian pada peringkat 5 dan 6 ditempati oleh daerah Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah PDRB sebesar 512.766 milyar rupiah dan Provinsi Riau dengan PDRB sebesar 482.087 milyar rupiah. Selanjutnya pada urutan ke-7 diduduki oleh kawasan Indonesia timur yang berada di Pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai total PDRB sebesar 464.823 milyar rupiah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi dengan nilai PDRB tertinggi di kawasan timur Indonesia yang berada diluar Pulau Jawa. Kemampuan suatu daerah untuk meghasilkan PDRB yang tinggi dapat menggambarkan tingkat pembangunan dan produktivitas yang tinggi, meskipun PDRB pada suatu wilayah tersebut tinggi, tingkat pemerataan pembangunan antar daerah belum tentu dapat merata. Pada proses

pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan antar daerah menjadi tujuan utama, namun pada nyatanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan ketimpangan pembangunan antar daerah, hal tersebut merupakan permasalahan yang penting mengingat bahwa pada tahun 2019 ibukota Indonesia telah resmi dipindahkan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Kab. Paser	32.755.520	33.137.650	34.356.410
Kab. Kutai Barat	18.468.160	19.139.860	20.103.630
Kab. Kutai Kartanegara	117.035.580	118.943.990	121.461.420
Kab. Kutai Timur	83.771.690	86.520.250	88.545.270
Kab. Berau	25.461.370	26.227.290	26.763.910
Kab. Penajam Paser Utara	6.351.930	6.506.880	6.587.330
Kota Balikpapan	73.221.460	76.032.080	79.793.800
Kota Samarinda	39.744.720	41.274.970	43.315.910
Kota Bontang	42.835.510	43.073.060	41.306.730

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (diolah)

Pada Tabel 1 terlihat adanya perbedaan jumlah produk domestik regional bruto antar daerah yang timbul di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016-2018. Jumlah produk domestik regional bruto tertinggi terjadi di kabupaten Kutai Kartanegara, diikuti oleh kabupaten Kutai Timur dan kota Balikpapan dengan nilai rata-rata PDRB sebesar 93.925.060 juta rupiah, sedangkan sisanya sebanyak 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Bontang hanya mampu menghasilkan nilai PDRB rata-rata sebesar 28.189.491 juta rupiah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antar daerah dalam aspek pendapatan ekonomi.

Dampak dari ketimpangan pembangunan antar wilayah yang semakin membesar akan menimbulkan masalah pada segi ekonomi, sosial dan politik. Peningkatan ketimpangan yang semakin meluas akan menyebabkan penurunan tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan mendorong adanya kesenjangan dalam pendapatan antar daerah.

Daerah-daerah yang cepat maju dan tumbuh, diharapkan mampu memberikan dampak sebar ke daerah lain yang terbelakang, sehingga terjadi pemerataan antar wilayah, namun pada prakteknya daerah cepat maju dan tumbuh justru menyebabkan ketimpangan antar daerah, karena penyerapan ekonomi akan terpusat pada daerah maju, sebaliknya daerah terbelakang akan semakin tertinggal. Penelitian ini berdasarkan pada periode 2013-2018 dimana provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil PDRB tertinggi di kawasan timur Indonesia dan berada di luar Pulau Jawa dan untuk mengetahui ketimpangan pada kawasan yang memiliki produktivitas tertinggi namun

berada diluar pulau jawa dan kawasan barat Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi di kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 10 Kabupaten dan Kota. Sedangkan pemecahan yang lebih kecil adalah sampel yang merupakan sebagian dari populasi yang dapat digunakan sebagai perwakilan atas seluruh bagian populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 9 Kabupaten dan Kota yang mana telah terbentuk sejak lama dan tidak pernah mengalami pemekaran maupun penggabungan serta telah memiliki data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik purposive sampling.. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi sendiri merupakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi sejumlah publikasi dari sumber-sumber tertentu yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan data yang tercantum pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada penelitian ini, analisis regresi data panel merupakan teknik analisis yang digunakan, regresi data panel merupakan perpaduan antara data cross section dan data time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu dengan obyek yang banyak, sedangkan pada data time series adalah data yang dikumpulkan pada beberapa periode waktu tertentu pada satu obyek. Pada penelitian ini model regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I_w = \beta_0 + \beta_1 I_{it} + \beta_2 BD_{it} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

V_w : Indeks Williamson

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi

I_{it} : Investasi (PMA + PMDN) Kab. i tahun t

BD_{it} : Belanja Daerah Kab. i tahun t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa perkembangan dan pemekaran wilayah hingga pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan berdiri dan sebgai wilayah Provinsi Kalimantan Timur berganti menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan pada tahun yang sama Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan 10 daerah diantaranya 7 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau, sisanya 3 Kota yang terdiri dari Kota

Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kandungan sumber daya alam melimpah yang terdiri dari olahan pertambangan batu bara, gas dan minyak bumi serta hutan penghasil kayu, dimana proses transportasi bahan kekayaan alam tersebut kebanyakan dilakukan melalui akses sungai dikarenakan banyaknya sungai yang terdapat pada Provinsi ini. Proses perekonomian hasil olahan sumber daya alam Provinsi Kalimantan sebagian besar di ekspor keluar negeri sehingga Provinsi ini termasuk Provinsi dengan penghasil devisa utama negara khususnya pada sektor Pertambangan, Kehutanan dan perkebunan.

Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan dapat menjelaskan mengenai pemerataan yang terjadi pada suatu daerah, pada penelitian ini ketimpangan pembangunan diukur dengan Williamson index yang didapatkan dari hasil perhitungan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Berikut besaran ukuran ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kotai provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 hingga tahun 2018:

Tabel 2. Nilai Indeks Wiliamson di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2018

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Kab. Paser	0,02	0,03	0,04	0,03
Kab. Kutai Barat	0,02	0,02	0,01	0,00
Kab. Kutai Kartanegara	0,08	0,07	0,07	0,07
Kab. Kutai Timur	0,27	0,26	0,26	0,26
Kab. Berau	0,03	0,04	0,04	0,04
Kab. Penajam Paser Utara	0,15	0,15	0,15	0,15
Kota Balikpapan	0,09	0,07	0,06	0,04
Kota Samarinda	0,33	0,33	0,33	0,32
Kota Bontang	0,19	0,19	0,19	0,17

Dapat dilihat pada Tabel 2, nilai ketimpangan tertinggi di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur selama 4 tahun terakhir terjadi di Kota Samarinda dengan nilai ketimpangan sebesar 0,32 yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, untuk tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 0,31, Kota Samarinda memiliki nilai ketimpangan tertinggi disebabkan oleh persentase jumlah penduduk kota Samarinda menempati urutan ke-2 terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara, persentase penduduk yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah produk domestik regional bruto, artinya jumlah PDRB per kapita yang terbentuk di Kota Samarinda sangatlah rendah dibandingkan PDRB per kapita daerah lainnya, tingginya jumlah kepadatan penduduk di Kota Samarinda disebabkan oleh konsentrasi ekonomi yang maju sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, membuat penduduk daerah lain tertarik untuk bermigrasi dan bekerja di Kota Samarinda.

Nilai ketimpangan terendah pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat dengan nilai ketimpangan sebesar 0,02. Pada tahun 2016 hingga 2018 ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten Kutai Barat dengan nilai ketimpangan sebesar 0,02 dan 0,01 pada tahun 2017 dan dapat dikatakan tidak ada ketimpangan pada tahun 2018 karena nilai indeks williamson sebesar 0, nilai ketimpangan yang terjadi pada Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser ini menandakan bahwa pemerataan yang terjadi pada daerah tersebut sangat baik, dan sangat sedikit kesenjangan yang timbul pada daerah tersebut. Pemerataan terjadi berdasarkan perbandingan antara presentase jumlah penduduk dan jumlah Produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser dengan jumlah keseluruhan total penduduk dan jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Timur, hasilnya masing-masing penduduk memiliki PDRB per kapita yang merata.

Tabel 3. Nilai Investasi di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Kab. Paser	545.573,40	1.013.419,98	1.033.480,22	7.944.412,42
Kab. Kutai Barat	8.747.513,50	4.014.735,28	2.886.383,18	4.182.921,78
Kab. Kutai Kartanegara	7.270.743,80	3.990.404,02	10.058.722,38	7.866.822,86
Kab. Kutai Timur	6.877.834,70	9.443.674,50	20.108.145,28	7.611.407,94
Kab. Berau	2.074.357,80	6.311.220,56	3.816.800,98	4.372.236,48
Kab. Penajam Paser Utara	667.988,50	1.199.502,84	1.010.490,60	341.984,36
Kota Balikpapan	36.881.787,50	11.425.316,68	4.619.250,58	2.446.790,24
Kota Samarinda	2.799.736,90	438.122,68	1.309.130,54	5.104.140,58
Kota Bontang	3.281.834,50	729.887,90	506.916,64	1.470.957,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

Terlihat pada Tabel 3 realisasi investasi terbesar pada tahun 2015 terjadi di Kota Balikpapan dengan jumlah investasi sebesar 36.881.787,50 (Juta Rupiah) yang mana angka investasi tersebut membuktikan bahwa Kota Balikpapan memberikan kontribusi investasi sebesar 53% terhadap jumlah total investasi di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dan realisasi investasi terkecil pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Paser dengan jumlah realisasi sebesar 545.573,40 (Juta Rupiah) yang artinya kabupaten Paser hanya memberikan kontribusi investasi sebesar 1% terhadap jumlah total nilai investasi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015. Pada tahun 2016 realisasi investasi tertinggi kembali terjadi di Kota Balikpapan dengan jumlah realisasi investasi sebesar 11.425.316,68 juta rupiah, nilai investasi yang dihasilkan oleh Kota Balikpapan menyumbang nilai total investasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 38% pada tahun 2016 Kota Balikpapan sendiri adalah daerah dengan kegiatan perekonomian yang tinggi di Provinsi

Kalimantan Timur, dimana sektor unggulan Kota Balikpapan berkaitan dengan kemajuan teknologi seperti bidang industri dan pengolahan gas bumi (Kilang gas bumi) serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Jumlah realisasi investasi terendah pada tahun 2016 terjadi di Kota Samarinda dengan jumlah 438.122,68 (Juta Rupiah) nilai tersebut membuktikan bahwa Kota Samarinda yang merupakan Ibukota provinsi Kalimantan Timur hanya mampu menyumbang nilai investasi sebesar 1% terhadap nilai keseluruhan investasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016. Meskipun pada tahun 2016 jumlah investasi tertinggi masih terjadi di Kota Balikpapan, namun jumlah investasi pada tahun 2016 tersebut mengalami penurunan sebanyak 69% dari tahun sebelumnya yang mencapai 36.881.787,5 juta rupiah, hal ini disebabkan karena penjualan hasil pertambangan mengalami penurunan, terutama pada hasil pertambangan non-migas yakni batu bara yang mengalami penurunan harga di dunia pada tahun 2016, sehingga nilai ekspor batu bara mengalami penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2017 realisasi investasi terbesar terjadi di Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah realisasi investasi sebesar 20.108.145,28 juta rupiah, dengan jumlah investasi yang dihasilkan, Kabupaten Kutai Timur menyumbang kontribusi investasi sebesar 44% dari nilai investasi keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, jumlah investasi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 112% dari tahun sebelumnya. Sumber dari jumlah total investasi Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 sebanyak 53% berasal dari penanaman modal dalam negeri. Sementara realisasi investasi terendah yang terjadi pada tahun 2017 terjadi di Kota Bontang dengan nilai realisasi investasi sebesar 506.916,64 juta rupiah, nilai investasi tersebut mengalami penurunan sebanyak 31% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2016, besaran nilai investasi di Kota Bontang banyak dipengaruhi oleh kegiatan produksi pertambangan dan penggalian termasuk migas, sehingga apabila nilai produksi pertambangan dan penggalian termasuk migas mengalami perubahan yang signifikan maka akan berdampak langsung pada nilai ekonomi Kota Bontang.

Pada tahun 2018 realisasi investasi terbesar terjadi di Kabupaten Paser dengan jumlah realisasi investasi sebesar 7.944.326,66 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan drastis dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang hanya berjumlah 1.033.480,22 juta rupiah, jumlah total investasi di Kabupaten Paser pada tahun 2018 banyak bersumber dari penanaman modal dalam negeri, nilai investasi yang dihasilkan kabupaten Paser pada tahun 2018 memiliki nilai kontribusi sebesar 19% terhadap nilai keseluruhan total investasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018. Sedangkan realisasi investasi terendah pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah realisasi investasi sebesar 341.984,36 juta rupiah, nilai ini mengalami penurunan sebanyak 66% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017 yang memiliki jumlah investasi sebesar 1.010.490 juta rupiah.

Tabel 4. Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Kab. Paser	2.238.535,57	1.516.909,20	1.696.531,93	1.902.473,19
Kab. Kutai Barat	2.143.841,25	1.808.269,89	1.539.116,36	2.005.905,29
Kab. Kutai Kartanegara	6.775.373,06	3.950.852,80	3.559.088,80	3.696.948,44
Kab. Kutai Timur	3.611.341,33	3.123.182,63	2.298.878,92	3.166.757,79
Kab. Berau	2.786.311,56	2.297.482,26	1.893.782,50	2.122.000,00
Kab. Penajam Paser Utara	1.391.575,60	1.307.221,97	1.012.317,87	1.505.316,44
Kota Balikpapan	2.907.590,32	2.115.715,70	1.760.740,29	2.120.970,18
Kota Samarinda	3.238.561,12	2.331.928,90	2.283.031,69	2.517.192,82
Kota Bontang	1.664.595,11	1.155.009,96	945.168,19	1.186.037,44

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Diolah)

Terlihat pada Tabel 4, pada tahun 2015 nilai belanja daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai belanja daerah sebesar 6.775.373,06 juta rupiah dengan besaran nilai tersebut Kabupaten Kutai Kartanegara terbukti mampu memberikan kontribusi besaran nilai belanja sebesar 25% terhadap nilai belanja daerah total di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah belanja daerah terendah pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah belanja daerah sebesar 1.391.575,60 juta rupiah yang mana nilai belanja tersebut hanya sebesar 5% dari jumlah total nilai belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016. Begitu juga pada tahun 2016 hingga 2018 jumlah belanja daerah tertinggi didominasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah belanja daerah sebesar 3.950.852,80 juta rupiah pada tahun 2016 kemudia menurun sebanyak 9,9% menjadi 3.559.088,80 juta rupiah pada tahun 2017 dan meningkat kembali sebanyak 4% menjadi 3.696.948,44 juta rupiah pada tahun 2018, banyaknya jumlah belanja Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh perkembangan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten ini sesuai proporsi perekonomiannya yang paling unggul di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ke-2 di Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki tingkat produktivitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kalimantan, sehingga kemampuan pelaksanaan belanjanya lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Nilai jumlah belanja daerah terendah pada tahun 2016-2018 terjadi di Kota Bontang dengan jumlah belanja daerah sebesar 1.155.009,96 juta rupiah pada tahun 2016, kemudian mengalami penurunan sebanyak 18% menjadi 945.168,19 juta rupiah pada tahun 2017 dan meningkat kembali sebanyak 26% menjadi 1.186.037,44 juta rupiah pada tahun 2018, angka belanja daerah Kota Bontang dipengaruhi oleh beberapa factor seperti, APBD yang banyak bersumber dari nilai transfer APBN melalui dana bagi hasil (DBH) atas kontribusi kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan dan penggalian (migas) sehingga apabila APBN mengalami penghematan dana maka akan secara langsung berdampak pada jumlah APBD dan belanja daerah Kota Bontang, masalah lainnya adalah lemahnya penyerapan dana belanja dimana sering mengalami sisa lebih penggunaan anggaran yang terjadi di Kota Bontang, sisa lebih penggunaan anggaran tersebut dinilai bahwa terdapat lemahnya penyerapan anggaran yang sesuai, apabila terdapat silpa maka pemerintah pusat dapat memberikan sanksi berupa potongan transfer APBN pada tahun selanjutnya hal ini membuat dana yang berasal dari pusat mengalami penurunan jumlah anggaran.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coeff	Fixed Effect t-Stat	Prob.
Dependent Variable : Ketimpangan			
C	-0.401830	-2.643186	0.0114
INVESTASI	0.003324	2.577137	0.5218
BELANJA DAERAH	0.080147	3.364292	0.0016
Effect Specification			
R-Squared	0.986606	F-statistic	316.7454
Adjusted R-squared	0.983491	Prob (F-statistic)	0.000000
t. tabel : 2.44691			
Cross Section Effect			
Kab. Paser	-0.0927		
Kab. Kubar	-0.1045		
Kab. Kukar	-0.0734		
Kab. Kutim	0.1174		
Kab. Berau	-0.086		
Kab. Penajam Paser Utara	0.0395		
Kota Balikpapan	-0.0622		
Kota Samarinda	0.1915		
Kota Bontang	0.0704		

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa hasil estimasi dari penggunaan model *Fixed Effect* (FE) memperoleh hasil persamaan regresi panel sebagai berikut :

$$\text{Ketimpangan} = -0.401830 + 0.003324 * X_1 + 0.080147 * X_2 + e.....(3)$$

$\beta_0 = -0,401830$ yang memiliki arti bahwa apabila besaran nilai variabel investasi dan variabel belanja daerah dianggap tidak mengalami perubahan atau tetap maka akan mengurangi nilai ketimpangan sebesar 0,401830.

$\beta_1 = 0,003324$ yang memiliki arti bahwa apabila nilai variabel investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel ketimpangan juga akan mengalami kenaikan nilai indeks sebesar 0,003324%, nilai ini terbentuk dengan asumsi variabel lain dianggap memiliki nilai konstan atau tetap.

$\beta_2 = 0,080147$ yang memiliki arti bahwa apabila nilai variabel belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel ketimpangan juga akan mengalami kenaikan nilai indeks sebesar 0,080147%, nilai ini terbentuk dengan asumsi bahwa variabel lain memiliki nilai konstan atau tetap.

Persamaan masing-masing kabupaten dan kota dapat dilihat melalui nilai intersept data. Intersept data berfungsi untuk menunjukkan perbedaan nilai tambah β_0 atau koefisien untuk masing-masing kabupaten maupun kota. Berdasarkan tabel 5 persamaan model masing-masing kabupaten dan kota tersebut dapat ditulis dengan nilai β_0 akan ditambah dengan koefisien masing-masing kabupaten dan kota, sebagai contoh kabupaten dan kota Bontang memiliki nilai koefisien sebesar 0.0704, artinya nilai koefisien kota Bontang tersebut akan dijumlahkan dengan nilai β_0 yakni sebesar 0.0934 maka akan menghasilkan nilai ketimpangan kota Bontang dengan asumsi bahwa nilai investasi dan belanja daerah nilainya tidak berubah atau konstan. Dari hasil coefficient effect masing-masing kabupaten dan kota dapat disimpulkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi di Kota Samarinda dengan nilai coefficient sebesar 0.1915, Kabupaten Kutai Timur dengan nilai coefficient sebesar 0.1174, Kota Bontang dengan nilai coefficient sebesar 0.0704 dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai coefficient sebesar 0.0395, sementara 5 kabupaten dan kota lainnya memiliki nilai ketimpangan yang rendah dibandingkan nilai ketimpangan rata-rata provinsi, dimana nilai ketimpangan terendah terdapat di Kabupaten Paser dengan nilai coefficient effect sebesar -0.0927.

Pada tabel 5 terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen (X) yakni investasi dan belanja daerah terhadap variabel dependen (Y) yakni nilai ketimpangan pembangunan. Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel jumlah investasi terhadap nilai ketimpangan pembangunan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5218, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 dan nilai t-statistik sebesar 2.577137 yang memiliki arti bahwa variabel jumlah investasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel nilai ketimpangan pembangunan ekonomi.

Hasil temuan dari penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, 2018 yang membahas mengenai ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Tengah, dimana hasil dari penelitian tersebut mendapati bahwa nilai investasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,9920 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan 0,05 dan memiliki nilai koefisien positif

sebesar 1,2511, maka dapat diketahui bahwa tingkat investasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakri et al, 2015 juga memiliki hasil serupa, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai t hitung sebesar 3.346145 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai t tabel yakni sebesar 2.57058.

Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel belanja daerah terhadap nilai ketimpangan pembangunan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Pada tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar 4.736492 yang memiliki arti bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel nilai ketimpangan pembangunan ekonomi. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmeli, 2014 yang membahas mengenai peran belanja daerah terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi belanja daerah sebesar 26.7% yang memiliki arti bahwa variabel ketimpangan pembangunan antar daerah dapat dijelaskan oleh belanja langsung dan tidak langsung sebesar 26.7%, sedangkan sisanya 73.3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model, nilai R square yang rendah dapat disebabkan karena variabel belanja daerah tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Jambi.

Hasil serupa terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Noto, 2017 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.012429 yang berarti dapat disimpulkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka nilai ketimpangan pembangunan wilayah akan meningkat sebesar 0.012429%. Koefisien determinasi dapat digunakan untuk menggambarkan apakah model yang telah digunakan dalam penelitian menunjukkan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yang mana tertera pada nilai R², apabila nilai R² semakin mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang dimiliki semakin kuat. Berdasarkan hasil koefisien determinasi model RE (Random Effect) pada tabel 5 yang memiliki nilai R² sebesar 0,986606 atau 98,66%, artinya variabel dependen (Y) yakni ketimpangan pembangunan memiliki pengaruh yang kuat untuk dapat dijelaskan oleh variabel independen (X) yakni variabel investasi dan belanja daerah, sementara sisanya sebesar 1,34% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Nilai R Square berada pada nilai 98,66% yang mana nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Y dapat dijelaskan sebanyak 98% oleh variabel

X, angka yang termasuk kecil ini dapat disebabkan oleh pengaruh yang secara tidak langsung berhubungan, pada dasarnya perhitungan ketimpangan pembangunan yang diukur melalui indeks wiliamson ini menggunakan perbandingan jumlah PDRB antar wilayah dengan jumlah penduduk, sehingga besar kecilnya nilai ketimpangan banyak dipengaruhi oleh jumlah PDRB dan jumlah penduduk masing-masing Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah diantaranya: Terkait penggunaan investasi, pemerintah daerah diharapkan lebih banyak menekankan penyerapan investasi terhadap bidang tenaga kerja dibandingkan tingkat modal terutama pada wilayah kabupaten yang realtif tertinggal, hal tersebut dapat memicu peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan tingkat produktivitas atau PDRB perkapita.

Pemerintah sebaiknya memperbanyak pengeluaran belanja daerah pada pos pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur serta sarana untuk peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja, contohnya seperti program pelatihan dan program ketenagakerjaan, hal ini berguna untuk pemerataan pada bidang ketengakerjaan dan peningkatan produktivitas daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian didapati bahwa nilai ketimpangan yang terjadi di Kabupaten dan Kota provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2018 tergolong rendah, dimana nilai ketimpangan tertinggi sebesar 0,33 yang terjadi di Kota Samarinda yang merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur, nilai tersebut tergolong rendah dikarenakan dalam indeks wiliamson apabila nilai indeks semakin mendekati angka 0 maka dapat diputuskan wilayah tersebut semakin merata. Variabel investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan ekonomi, dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila variabel investasi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan nilai variabel ketimpangan pembangunan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan ekonomi, dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila variabel belanja daerah mengalami peningkatan maka akan meningkatkan nilai variabel ketimpangan pembangunan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel investasi dan belanja daerah, keduanya memiliki pengaruh yang positif untuk meningkatkan variabel ketimpangan pembangunan ekonomi, namun variabel belanja daerah memiliki nilai pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Pembangunan Daerah*, 7(1), 32–33.

- Bakri, B., Syafrizal, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Dan Kebijakan Penangkulannya. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4(7), 6–8.
- Dhyatmika, K. W. (2013). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*, 4(2), 11-13.
- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah*. Jakarta: Rahawali Press, 78-81.
- Jumlah Penduduk per kabupaten/kota, (2015-2018). Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2015-2018 (p. 76). Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur
- Noto, G. (2016). *Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. 4(2), 11.
- Nurhuda, R., Muluk, M. K., & Prasetyo, W. Y. (2013). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, 110-119.
- Produk Domestik Regional Bruto per kabupaten/kota, (2015-2018). Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2015-2018 (p. 507). Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur.
- Rosmeli. (2014). Halaman Tulisan Jurnal (Judul dan Abstraksi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), 88–90.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Depok: PT. Raja Grafindo.